

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT
KABUPATEN BONE**

**Skripsi
untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Oleh
Aswardi
E12108281**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT
KABUPATEN BONE

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Aswardi

E12108281

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

pada tanggal 19 februari 2014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof.Dr.H.Faried Ali.SH.MS
NIP. 194212171 196704 1 001

Dr. Hj. Nurlinah. M.Si
NIP. 19630921 198702 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan/ Ketua Program studi Ilmu
Pemerintahan

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Dr. H.A. Gau Kadir, M.A

NIP. 19501017 198003 1 001

KATA PENGANTAR



Penulis menyadari sesungguhnya bahwa penyelesaian penelitian skripsi ini merupakan karunia besar dari Yang Maha Agung, Allah SWT. Atas karunia-Nya itu, penulis memiliki “kewajiban agung” untuk selalu mensyukuri dengan mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu Akbar.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”** tidaklah diselesaikan dengan proses yang amat mudah. Berbagai hambatan penulis temui dalam tahap-tahap penelitian, penulisan dan bimbingan seperti keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Namun penulis yakin bahwa diantara hambatan-hambatan yang ditemui itu juga dialami oleh peneliti lain bahkan sangat mungkin dengan penuh ketegangan. Sungguh suatu anugerah yang patut peneliti syukuri karena semua hambatan itu berhasil dilewati.

Penulis mengucapkan terima kasih yang dalam dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberi simpati, perhatian dan bantuan atas penyelesaian skripsi ini. Suatu kedurhakaan yang tak terampuni bilamana penulis menyepelkan jasa baik kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa restu, motivasi dan kasih sayang kepada penulis. Untuk itu rasa hormat dan

cinta yang sangat dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua; ayahanda H.Muh Natsir DM dan Almarhuma ibunda Rosnaeny, keluarga besar di Kabupaten Bone. Merekalah yang sangat pantas menerima segala kehormatan dan penghargaan atas kesuksesan studi ini. Juga kepada kakanda tercinta; Asrianto, Asdar, Asrul, Asrudi, Hj. Sitti Nahidat dan Asrini, terima kasih atas keceriaan dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian studi ini.

Rasa hormat yang tinggi hingga akhir hayat penulis sampaikan kepada Prof.Dr.H. faried Ali SH.MS selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing II. Keduanyalah yang membimbing penulis dengan penuh kesejukan di bawah lindungan tradisi akademik “khas Unhas”, yang tegas pada kompetensi tetapi sangat memanusiakan manusia.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. H.A. Gau Kadir, MA, Dr.H.A. Samsu Alam,dan Rahmatullah S.IP, MSi, M.Si atas masukan dan kritiknya sebagai anggota Tim Penguji. Tentunya, semua itu tidak terlaksana tanpa bantuan Staf Bagian Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Keuangan Fisip Unhas dan Staf Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fisip Unhas; Ibu Hasna, Ibu Kasma, Ibu Lini, Pak Anwar, Pak Laode, Kak Nanna, Kak Irma, Kak Mail, Kak Aisyah, Kak Ija, Kak Ancu dan Kak Mursalim yang sangat bersahabat, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih.

Kepada Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.BO, Prof. Dr. D.A. Suriamiharja, M.Eng, Dr. dr. A. Wardihan Sinrang, M.S, Ir. Nasaruddin Salam, M.T, Prof. Dwia A. Tina N.K, M.A, Prof. Dr. H. Faried Ali, S.H, M.S, Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si, Prof. Dr. H. Hamka Naping, M.A, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Dr. H. Supriadi Hamdat, M.A, Dr. H.A. Syamsu Alam, M.Si, Dr. Rasyid Thaha, M.Si, Drs. Abdul Salam Muchtar, Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, Dr. A.M. Rusli, M.Si, Dr. Muh. Tamar, M.Psi, Dr. Hasrullah, MA, Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si, Drs. Arsyad, MA, dan Drs. Bahar Akkase Teng, Lc.Hum, penulis mengucapkan terima kasih dan hormat yang tulus atas ketokohan, ketaudanan dan nasihat-nasihatnya yang sangat berharga.

Penghargaan yang tinggi juga penulis sampaikan kepada para informan, Pak Andi Sirnang selaku Camat Kecamatan Tanete Riattang Barat, Pak Anwar Sahude Kasubag bidang Perekonomian Kabupaten bone, Malik SS sebagai Sekertaris Lurah Macanang, Pak nasrul sebagai Lurah Bulutempe dan masyarakat penerima raskin Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Atas pengetahuan dan keterbukaannya memberikan data dan informasi terkait topik penelitian ini.

Kepada saudara-saudariku Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS **Glasnost 08 “*satu generasi satu perjuangan*”**,

Ketua angkatan Anita Nurak, Asrul Nurdin, Ashar Prawitno, Avrina Dwi Jayanti, Agusman Hidayat, Aan Saddam Husain, Fahri Rezki Rahman, Fitriani Sari Handayani R, Melisa Fitra, Haswan, Anjar Zakaruddin,

Ahwandy Hasim, Muh. Nur Hidayat, Miskat Agussalim, Kukuh Erlangga, Rini Indriani, A.Ardiana Islamia P, Indah Iswari Johor, Firman Udding, Akmaluddin Haswin, Abdul Gafur, Subandi, Hijra Kherana, Andi Muh. Lutfi ABD, Reskianto Taulabi Kia, Febrina Fonna, Edi Wahyu, Hidayatul Mursyidin, Ayu Khaira, Nurlaila, Erlangga Dwi Putra, Andi Ashabul, Reksa Burhan, Muh. Ansari S, Aswardi, Herwin Gunawan, Yuniar Eka Rahmi, A.Muh.Akram AP, Kasmira, Ermitha, Muh. Farid Hermansyah, Zahra AR, A.Muzkirah, Alfriyady, Arianitalia, Istiana Aminuddin, Sufriyadi S, Desi Adriani Pertiwi, La Ode Muh. Amin, Asrul Prayudha I, Silvanti A.S, Azmanirah M, Satriah, Muh. Agus B, Muh. Reza Pratama, Syukriyadi S. dan ini penulis Mengucap terima kasih untuk setiap hari yang luar biasa, senang rasanya bisa mengenal sikap dan sifat kalian. Bukan perpisahan hanya berjalan ke tempat lain yang penuh tanda Tanya, hanya pergi sebentar akan kembali untuk bercerita tentang segala pelajaran yang didapatkan di luar sana. Terima kasih untuk semua pembelajaran akan sebuah pencarian tentang siapa sebenarnya diri ini. Tak akan pernah habis cerita dan kisah tentang kita. Glasnost “***never end story***”.

Terima kasih kepada teman-teman KKN gelombang 82 Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpo’e Desa Teteaji, Aryo, Qadri, Ode, Yudha, Ila, Shelly, Melda dan Della.

Terima kasih juga untuk Nandar, Dedy, Dayat, adinda Cuna dan Anto atas kesediaannya meminjamkan laptop, printer, *mousenya* dan juga kendaraannya

selama proses penyusunan skripsi ini, yang seringkali juga mendampingi penulis dalam mengunjungi lokasi penelitian dan pengurusan berkas.

Terimakasih juga kepada Hamzi and the Gank, Pak Aris, heri, Firman, Fajar, Andi Sul Pamelleri dan para gadis- gadis yang telah menginspirasi dalam penulisan skripsi ini. Kesalahan sekecil apapun yang ada dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penulis harus mengakhiri semuanya dengan suatu pernyataan bahwa balas budi akan penulis bawa hingga akhir hayat untuk jasa baik dari mereka yang namanya tidak disebutkan satu persatu dalam lembar kata pengantar ini. Penulis sangat yakin dan selalu berdoa agar Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Adil akan membalasnya dengan pahala tak terhingga baik di dunia maupun akhirat. Bukankah Allah SWT telah menjanjikan derajat yang tinggi bagi hamba-hambanya yang beriman dan berilmu pengetahuan, serta pahala yang tak ternilai dan terhingga untuk setiap niat baik dan pertolongan tanpa pamrih. Amiin.

Makassar, 19 februari 2014

Aswardi

ABSTRAK

Aswardi (E 12108281). *Implementasi Beras Miskin (RASKIN) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.* Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Faried Ali, SH. MS dan Dr. Hj. Nurlinah M, M.Si.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahpun terasa terbatas dan gagal dalam menanggulangnya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan. Program raskin merupakan salah satu program-program penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada prinsip penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin. Kecamatan Tanete Riattang Barat tercatat 1887 rumah tangga sasaran miskin (RTSM) yang berhak mendapatkan program beras miskin. Untuk itu diperlukan pelaksanaan program raskin yang disalurkan secara baik guna membantu kehidupan masyarakat miskin di Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan mengambil 2 (dua) objek yaitu Kelurahan Bulutempe dan Kelurahan Macana. Informan dalam penelitian ini adalah penanggung jawab program di tingkat kabupaten, kecamatan, dan tingkat kelurahan serta masyarakat penerima manfaat yang representatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara observasi, wawancara dan telaah dokumen. Data yang didapat kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan sampai pada penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan secara umum implementasi program raskin di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, adapun permasalahan yang timbul dalam proses implementasi raskin yakni pertama, penepatan daftar nama-nama RTS-PM yang tidak sesuai; kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi raskin; ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin dan yang terakhir kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran raskin.

Kata Kunci : *Implementasi Beras Miskin*

ABSTRACT

Aswardi (E 121 08 281). *Implementation Rice Poor (Raskin) in the district of West Regency Bone Tanete Riattang. Under the guidance of Prof. Dr. H. Faried Ali, SH. MS and Dr. Hj. Nurlinah M, M.Sc.*

Poverty is one of the major unresolved problems in Indonesian. Policy was limited and the government is failing to cope, so that no single point of certainty when it will be receding row of poverty. Raskin program is one of the poverty reduction programs based on the principles of respect, dignity, and fulfillment of basic rights for the poor. Subdistrict Tanette West Riattang recorded in 1887 targeted poor households (RTSM) are entitled to receive rice for the poor program. It is necessary for the implementation of the Raskin program, delivered either to help the lives of poor people in Sub Tanete Riattang West.

This study used a qualitative approach. Location of the study was conducted in the District Tanete Riattang West by taking 2 (two) objects that Bulutempe Village and Village Macana . Informants in this study is in charge of the program at the district, sub-district and village level as well as the community representative beneficiaries. In collecting the data , the writer uses observation, interviews and document review. The data obtained were analyzed using qualitative data analysis techniques and came to the conclusion.

The results showed the general implementation of the program in the district Raskin Tanete Riattang West Regency Bone has been going well, as for the problems that arise in the process of implementing the first Raskin, appropriate list of the names of RTS-PM is not appropriate; secondly, the lack of coordination between the organizers implementation raskin distribution; third, the lack of government oversight authority over the process and the final distribution of Raskin lack of socialization natural order Raskin distribution program.

Keywords : Rice Poor Implementation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL & GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Mamfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.6 Metodologi Penelitian	10
1.6.1 Lokasi Penelitian	10

1.6.2 Tipe dan Bentuk Penelitian	10
1.6.3 Sumber Data	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.5 Subyek dan Informan	13
1.6.6 Analisis Data	13
1.6.7 Definisi Operasional.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi	15
2.2 Konsep Kebijakan	27
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan.....	29
2.4 Konsep Beras Raskin	32
2.5 Konsep Kemiskinan	35

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Keadaan Geografis	42
3.1.1 Letak dan Luas Wilayah	42

3.1.2 Keadaan alam dan Iklim	45
3.2 Keadaan Demografi	47
3.2.1 Jumlah Penduduk	47
3.2.2 Ketenaga Kerjaan	49
3.2.3 Sosial, Budaya dan Agama	51
3.3 Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riattang barat	51
3.3.1 Aspek Fisik	53
3.3.2 Demokrasi/ Kependudukan	54
3.3.3 Sektor Keamanan	54
3.3.4 Sektor Pemerintahan	55
3.3.5 Sektor Perekonomian.....	56

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Taneteriattang Barat Kabupaten Bone	59
4.1.1 Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin pada tingkat Pusat	60
4.1.2 Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Provinsi	64
4.1.3 Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kabupaten	66

4.1.4 Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kecamatan	71
4.1.5 Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kelurahan	76
4.2 Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam Proses Implementasi Program Raskin.	82
4.2.1 Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya	82
4.2.2 Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin	86
4.2.3 Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin.....	89
4.2.4 Kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran raskin	91
4.3 Konsep Pengelolaan Raskin ke Depan.....	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	
96	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

BAB III

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Kecamatan.....	44
Tabel 3.2 Jumlah penduduk Kabupaten Bone berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin	47

BAB IV

Tabel 4.1 Tahapan Proses penyaluran Beras untuk rakyat miskin (Raskin)	60
Tabel 4.2 Pagu alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat	73
Tabel 4.3 Pagu alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat perbulannya pada Tahun 2013	74

Daftar Gambar

BAB I

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual	9
BAB III	
Gambar 3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bone	43
Gambar 3.2. Grafik Luas Wilayah Kabupaten Bone.....	45
Gambar 3.3 Struktur organisasi Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik, ekonomi sosial budaya, stabilitas nasional maupun pertahanan keamanan. Dalam bidang Pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem Pemerintahan wilayah Indonesia

dibagi dalam wilayah yang lebih kecil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintah Negara , dan hak-hak asal usul dalam daerah - daerah yang bersifat istimewa”

Dengan pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten/Kota, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan,Salah satunya ialah upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural atau struktural. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang

mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir masalah kemiskinan ini seperti melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Beras Miskin sebenarnya merupakan salah satu dari usaha Pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program Raskin ini sebenarnya diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei-Juni 1998, Menghadapi situasi ini, Pemerintah telah memutuskan membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan *Food CrisisCenter* atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dengan diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG. Penunjukan BULOG untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan

stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada Pemerintah. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Tahun 2002 program ini diganti menjadi program Raskin (beras miskin).

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin berdasarkan PAGU (Plafon Gubernur).

Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah bagi masyarakat. Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka

menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

Dalam pelaksanaan program Beras miskin ini kerap kali terjadi penyimpangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima beras miskin. Salah satunya ialah masih banyaknya masyarakat yang sejahtera tetapi tetap mendapatkan beras miskin, sedangkan masyarakat yang betul-betul dalam kategori miskin tidak merasakan program ini. Hal ini dikarenakan data dari kantor statistik yang diterima Kecamatan ataupun Kelurahan merupakan data lama (belum diperbaharui) sehingga tidak akurat untuk keadaan sekarang. Dimana ada masyarakat yang telah sejahtera, tetap menerima beras miskin dikarenakan data yang diterima mengatakan bahwa masyarakat tersebut masih dalam kategori miskin. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa program beras miskin ini merupakan program Kecamatan, bukan program dari Pemerintah pusat. Sehingga mereka datang ke kantor Kelurahan untuk meminta jatah beras miskin walaupun nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima beras miskin. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai beras miskin ini kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Permasalahan lainnya ialah pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang kadang terlambat. Pendistribusian ini dilakukan

dengan cara menelpon kepada penerima beras miskin satu persatu, dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti mengenai datangnya beras miskin ini dari BULOG.

Dari paparan mengenai Program beras miskin tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan distribusi beras miskin masih terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem yang dijalankan, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”** Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini maka terlebih dahulu diperjelas permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dengan memberikan batasan masalah. Batasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone?
2. Masalah-masalah apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan dalam proses implementasi program Raskin di Kecamatan Tanete Riattang Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam implementasi kebijakan Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yang dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait didalamnya, yakni :

- a. Manfaat Akademis :
 - Sebagai pelengkap bahan studi ilmu Pemerintahan tentang gambaran langsung Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone di Indonesia.
 - Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Implementasi Program

Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), serta bentuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di masyarakat.

b. Manfaat Praktis :

- Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau program kerja dalam pengembangan Pemerintahan daerah terkhusus bagi mahasiswa dalam bidang ilmu Pemerintahan.
- Sebagai masukan bagi Pemerintah dalam menjalankan peran serta fungsinya sebagai pelaksana pembangunan fasilitas layanan sipil yang ada untuk masyarakat.

1.5. Kerangka Konseptual

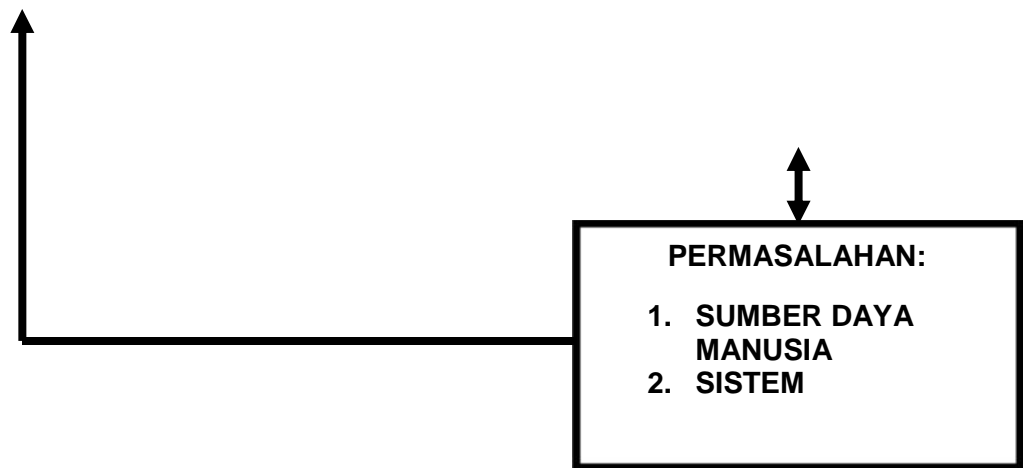
Program Raskin adalah program Pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional yang dimaksudkan untuk memberikan akses pangan, baik secara fisik yakni tersedianya beras di titik distribusi (TD), maupun secara ekonomiyakni harga jual yang terjangkau kepada rumah tangga sasaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Adapun yang di maksud dengan program Raskin dalam penelitian ini adalah adalah program penanggulangan kemiskinan kluster satu, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga

yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Jika rata-rata konsumsi beras nasional sekitar 113,7 kg/ per kapita/ tahun dan setiap RTS-PM terdiri atas empat jiwa, maka program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,6 % dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap RTS. Adapun gambaran dari penyelenggaraan Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dapat dilihat pada gambar 1.1 :

KERANGKA KONSEP





Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai

implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di peDesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

A. Teori George C.Edwards III (1980)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1). Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi

distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2). Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3). Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara

dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4). Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

B. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa dkk 1995) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang diDesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang

terlaksana. variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

- 1) Kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.
- 3) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Letak pengambilan keputusan.
- 5) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
- 6) Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan

sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

C. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resource).
- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk

melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

D. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan weimer dan vining(1999:396) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- 1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis.
- 3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan

E. Tahapan Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan

bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

Terhadap berbagai faktor dalam implementasi kebijakan, Wibawa(1994:39) memberikan gambaran dalam bentuk bagan atas determinan kinerja implementasi kebijakan. Dijelaskan bahwa ada 4(empat) faktor yang saling berinteraksi yang berfokus pada kinerja kebijakan, faktor tersebut secara berturut-turut adalah: 1) isi kebijakan, 2) political will, 3) karakteristik kelompok sasaran, dan 4) dukungan lingkungan.

2.2 Konsep Kebijakan

2.2.1 Pengertian kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan, sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak.

Menurut Budi Winarno dalam bukunya Kebijakan Publik: Teori dan Proses (2007:16) mengutip pernyataan Charles O.Jones dalam bukunya *An Introduction to the Study of Public Policy* (1984)

mendefinisikan kebijakan sebagai kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Menurut Edi Suharto dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2005:7) mendefinisikan kebijakan sebagai :

“Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)”.

Kebijakan sebagai studi diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur paksaan atau pengaturan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak.

Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga Pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:6) mengutip pernyataan Robert Eyetone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit Pemerintah dengan lingkungannya.

Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar *scholar* (pelajar) yang mempelajarinya. Padahal dalam lingkup yang nyata kebijakan publik tidak selalu menggambarkan keluasan definisi. Dalam buku yang sama Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik: sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:8) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah dari pada

keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh Pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan Pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat Pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak

mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan Pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Namun dalam karya ilmiah tentang studi Kebijakan Publik yang disusun oleh Faried Ali pada tahun 2008 menguraikan bahwa suatu kebijakan dapat disebut kebijakan publik jika memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Adanya pernyataan kehendak. Berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas, berarti ada kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau organisasi, terlepas dari mana kewenangan diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses demokratisasi yang berlangsung.

Seorang pemegang otoritas beroleh atribut sebagai pejabat (administrator, executive, politisi dan tehnis). Sedangkan lembaga yang memiliki atau memperoleh otoritas adalah setiap kesatuan lingkungan kerja yang mengembangkan bidang tugas dan fungsi tertentu seperti departemen, lembaga non departemen, badan, dinas, jawatan, daerah (swapraja dan

swatantra), unit pelaksana tugas / daerah dan negara sekalipun. Mereka para pemilik atau yang memperoleh otoritas. Mereka adalah subyek kebijakan yang dalam bahasa hukum divariabelkan sebagai subyek hukum tata Pemerintahan.

3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya. Pengaturan yang dilakukan melalui kegiatan administrasi, melalui kegiatan pengelolaan (manajemen), dan melalui penuangan kehendak lewat aturan perundangan yang berlaku. Kesemuanya diarahkan pada terciptanya ketertiban dalam kehidupan organisasi.
4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu pencapaian, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status.

Apa yang menjadi hakekat arti kebijakan melahirkan pertanyaan; bagaimanakah dengan pengambilan keputusan (decision making), bukankah pengambilan keputusan adalah hasil pilihan dari sejumlah alternatif. Sifat kebijakan publik adalah

kontinum yang berarti sesuatu yang berlangsung secara terus menerus, begitu pilihan alternatif diambil akan diikuti oleh pelaksanaan kehendak sebagai pilihan tindakan.

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

Implementasi (implementation) menurut Kamus Ilmiah Populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan Implementasi kebijakan publik sebagai *"getting the job done and doing it"* (mendapatkan pekerjaan dengan baik dan melakukannya). Dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan diatas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan:

pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan)kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep. Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja (Nugroho, 2003:158) Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

2.4 Konsep Beras Miskin

Beras Miskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

Adapun yang di maksud dengan program Raskin dalam penelitian ini adalah adalah program penanggulangan kemiskinan kluster satu, termasuk program bantuan sosol berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Jika rata-rata konsumsi beras nasioanal sekitar 113,7 kg/ per kapita/ tahun dan setiap RTS-PM terdiri atas empat jiwa, maka program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,6 % dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap RTS.program Raskin tergolong program nasional. Program ini melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horzontal, secara horizontal semua sektor terkait memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam pelaksanaan program Raskin .issue aktual yang terkait secara horizontal adalah penetapan data dari RTS . programRaskin mengacu pada data RTS hasil PPLS 2011 BPS. Yang di tetapkan oleh TNP2K menggunakan sistem basic data terpadu perlindungan sosial.

Secara vertikal program Raskin bukan semata-mata program pusat semata, akan tetapi Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara proporsional. dalam hal ini Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan dalam pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh Perum BULOG di salurkan sampai titik distribusi (TD) untuk selanjutnya Pemerintah daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu , tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi) oleh karena itu pelaksanaan program Raskin sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan dan biaya operasional dll.

- a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat adalah rumah tangga miskin di Desa atau Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah sebagai hasil dari musyawarah Desa/ Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai dengan pendapatan PPLS-11 BPS tahun 2011.
- b. Musyawarah Desa/ Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/ Kelurahan yang melibatkan

aparatur Desa/ Kelurahan. Dan perwakilan RTS-PM Raskin di setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.

- c. Titik distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat Desa/ Kelurahan atau lokasi yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintahan Kabupaten/ Kota dengan drive/subdrive/ kansilog Perum BULOG.
- d. Titik bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari pelaksana distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- e. Pelaksana distribusi Raskin adalah kelompok kerja (Pokja) di TD yang ditetapkan oleh kepala Desa/ Lurah.
- f. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/ Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/ Kelurahan, ketua RT/RW/RK dan beberapa orang ditunjuk oleh dan ditetapkan oleh kepala Desa/ Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- g. Padat karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja dan meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HBD Raskin oleh Pemerintah daerah melalui APBD.

- h. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh divisi regional (Divre)/ sub divisi regional(subdrive) kantor seksi logistic(kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan surat perintah (SP) Kadivre/ KasubKadivre/Kakansilog.
- i. Kualitas beras adalah beras mediumkondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
- j. SPA adalah surat Pemerintahan alokasi yang dibuat oleh Bupati/ Walikota atau ketua tim Koordinasi RaskinKab/ Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota kepada Kadivre/ Kasubdivre/ Kakansilog berdasarkan alokasi PaguRaskin dan rincian masing-masingKecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- k. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) /delively order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- l. BAST adalah berita acara serah terima beras berdasarkan SPA dari Bupati/ Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan pelaksana distribusi.

- m. DPM-1 adalah model daftar penerima manfaat Raskin di Desa/ Kelurahan.
- n. DPM-2 adalah model daftar penjualan Raskin di Desa/ Kelurahan.
- o. HPB adalah harga penjualan beras secara tunai sebesar Rp. 1600/ kg netto di TD.
- p. PPLS-11 adalah pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS.

2.5 Konsep Kemiskinan

2.5.1 Definisi Kemiskinan

Secara etimologis kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,2002). Dalam konteks politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial. Frank Ellis (dalam Suharto 2005) menyatakan

bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Orang disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang mereka miliki di bawah target atau patokan yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan kemiskinan sosial adalah kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung orang untuk mendapatkan kesempatan - kesempatan agar produktivitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Kemiskinan dalam pengertian konvensional merupakan pendapatan (*income*) dari suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu seringkali berbagai upaya pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Dalam Panduan Keluarga Sejahtera kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.

2.5.2. Penyebab kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000:107) sebagai berikut:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah

- b. kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas dan upahnyapun rendah
- c. kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah

Penyebab Kemiskinanpun banyak dihubungkan dengan:

- a. penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
- b. penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
- c. penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau

dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.

- d. penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, Pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
- e. penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

2.5.3 Mengukur kemiskinan

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian, yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah presentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia

(kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).Bank Dunia mendefinisikan *Kemiskinan absolut* sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan *Kemiskinan menengah* untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dg batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pendekatan wilayah, merupakan pendekatan untuk memperkirakan penduduk miskin melalui kantong-kantong kemiskinan yang berupa Desa miskin (Desa tertinggal). Secara makro, pendekatan wilayah dilakukan berdasarkan asumsi bahwa penduduk miskin dapat diidentifikasi melalui fasilitas (infrastruktur), kondisi jalan, akses terhadap alat transportasi, sarana kesehatan, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat di wilayah yang diamati. Apabila infrastruktur wilayah tersebut tergolong berkualitas rendah, maka besar kemungkinannya tingkat kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tergolong rendah.
2. Pendekatan rumah tangga, adalah pendekatan yang mengacu kepada ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Perhitungan jumlah penduduk miskin dengan pendekatan rumah tangga pada prinsipnya adalah mengukur ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan yang paling minimal.

Data dasar yang digunakan untuk melakukan penghitungan adalah data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Survei ini dilakukan setiap tahun oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Dalam setiap survei ada 2

(dua) kelompok pertanyaan, yaitu : Kor dan Modul. Data Kor mencakup variabel demografi dan partisipasi sekolah anggota rumah tangga, dan selalu dikumpulkan setiap tahun. Sedangkan Data Modul dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu : (1) Konsumsi pengeluaran rumahtangga, (2) Kriminalitas, perjalanan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat. (3) Pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Penghitungan jumlah penduduk miskin didasarkan pada data Susenas Modul Konsumsi. Kriteria yang digunakan dalam pengukuran batas kemiskinan adalah ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan minimum pangan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-pangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian, maka penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang Barat khususnya di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Tipe dan bentuk penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana

implementasi program beras miskin untuk masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat (Kabupaten Bone).

Bentuk penelitian adalah Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan/ hukum/ kondisi tertentu atau melakukan kajian terhadap norma hukum tidak tertulis.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap penelitian).

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, Arsip-arsip resmi, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.

3.5. Subyek dan informan penelitian

Subjek penelitian ini adalah Aparat Pemerintahan serta masyarakat di Kabupaten Bone khususnya Kecamatan Tanete Riattang Barat. Pemilihan subjek dilakukan dengan metode

purposive yaitu memilih orang yang dianggap betul-betul memahami realitas yang terjadi. Untuk itu informan yang dipilih adalah :

1. Kabag Ekonomi di Kantor Bupati Bone
2. Kepala Gudang Bulog di Kabupaten Bone
3. Camat di Kecamatan Tanete Riattang Barat
4. Lurah di Kelurahan Bulutempe
5. Sekretaris Lurah di Kelurahan Macanang
6. Ketua RW dan RT di Kelurahan Macanang dan di Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat
7. Panitia Penyalur Beras Miskin di Kecamatan Tanete Riattang Barat.
8. Masyarakat penerima manfaat yang bertempat tinggal di Kelurahan Macanang dan di Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat.

3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses

pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

3.7. Definisi operasional

Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator serta perlunya identifikasi dan definisi terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, sebagai berikut :

- 1) Implementasi Program beras untuk masyarakat miskin yang dimaksud adalah pelaksanaan/proses distribusi bahan pangan publik yang dibutuhkan beras yang murah dan terjangkau oleh masyarakat yang dalam hal ini merupakan program langsung oleh Pemerintah berdasarkan :
 - ✓ Kemenko Kesra RI 2012 (Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012)
 - ✓ Keputusan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pagu Alokasi Beras untuk Rumah tangga miskin.
- 2) Beras untuk Masyarakat Miskin, Yang di maksud dengan program Raskin dalam penelitian ini adalah adalah program penanggulangan kemiskinan kluster satu, termasuk program bantuan sosial berbasis

keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan.

- 3) Kemiskinan oleh Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, di definisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, oleh karena itu memerlukan bantuan melalui program Pemerintah seperti Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), sehingga beras yang ada dipasaran dengan harga Rp.5.500/Kg namun Raskin dapat dibeli dengan Harga Rp. 1.600/Kg.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Geografis

4.1.1 Letak Dan Luas Wilayah

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini mempunyai garis pantai sepanjang 138 dari arah

- Luas wilayah Kabupaten Bone seluruhnya berjumlah kurang lebih 4.559.000 km². Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang diperinci menjadi 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) Desa dan 39 (tiga puluh Sembilan) Kelurahan dengan jumlah Dusun sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu).

Sumber :BPSKabupatenBone 2012

Sumber :BPS- KabupatenBone Dalam Angka Tahun 2012

Adapun luas wilayah Kabupaten Bone dirinci menurut luas Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1.

Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Kecamatan

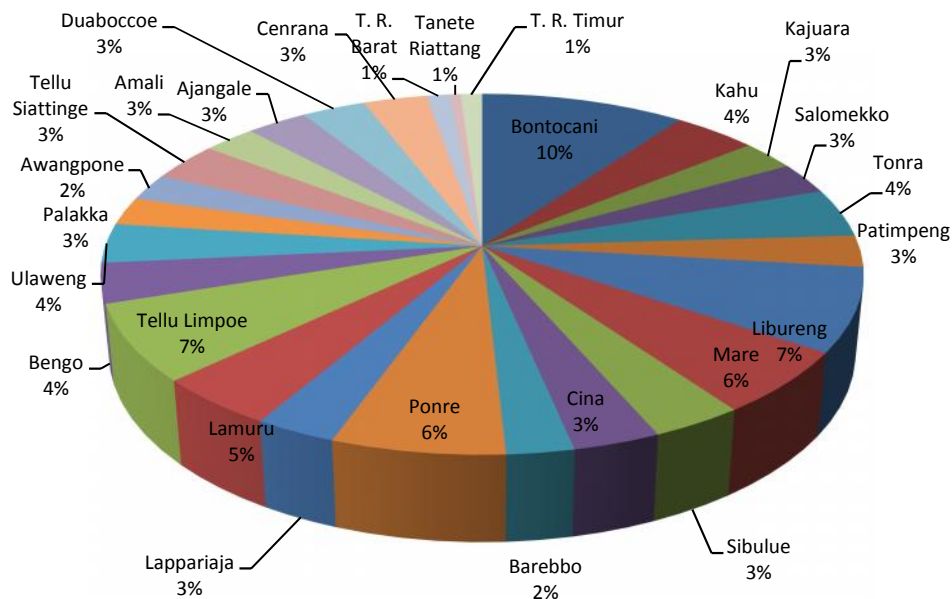
Kode/ Wilayah Area Code	Kecamatan District	Luas Area (km²)	Perentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
010	BONTOCANI	463.35	10.16
020	KAHU	189.50	4.16
030	KAJUARA	124.13	2.27

040	SALOMEKKO	84.91	1.86
050	TONRA	200.32	4.39
060	PATIMPENG	130.47	2.86
070	LIBURENG	344.25	7.55
080	MARE	263.50	5.78
090	SIBULUE	155.80	3.42
100	CINA	147.50	3.24
110	BAREBBO	114.20	2.50
120	PONRE	293.00	6.43
130	LAPPARIAJA	138.00	3.03
140	LAMURU	208.00	4.56
141	TELLU LIMPOE	318.10	6.98
150	BENGO	164.00	3.60
160	ULAWENG	161.67	3.55
170	PALAKKA	115.32	2.53
180	AWANGPONE	110.70	2.43
190	TELLU SIATTINGE	159.30	3.49
200	AMALI	119.13	2.61
210	AJANGALE	139.00	3.05
220	DUA BOCCOE	144.90	3.18
230	CENRANA	143.60	3.15
710	TANETE RIATTANG	53.68	1.18
720	TANETE RIATTANG BARAT	23.79	0.25
730	TANETE RIATTANG TIMUR	48.88	1.07
JUMLAH		4559.00	99.28

Sumber :BPS- KabupatenBone Dalam Angka Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.1 , dapat diketahui Kecamatan yang memiliki wilayah terluas dan tersempit.Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bontocani dengan luas 463,35 km² dengan persentase 10,16 %, sedangkan yang tersempit adalah Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan luas wilayah 23,76 km² dengan persentase 0,25%.

Gambar 4.2. Grafik Luas Wilayah KabupatenBone



Sumber :BPS - KabupatenBone Dalam Angka Tahun 2012

4.1.2 Keadaan Alam dan Iklim

Secara umum keadaan permukaan alam Kabupaten Bone bervariasi mulai dari landai, bergelombang, hingga curam. Daerah landai dapat dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian barat dan selatan umumnya bergelombang dan curam. Adapun jenis tanah di daerah ini didominasi tanah Mediteran. Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari seribu meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :

- Ketinggian 0 – 25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%)
- Ketinggian 25 – 100 meter seluas 101.602 Ha (22,29%)
- Ketinggian 100 – 250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)
- Ketinggian 250 – 750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)

- Ketinggian 750 meter ke atas seluas 40.080 Ha (13,76%)
- Ketinggian 1000 meter ke atas seluas 6.900 Ha (1,52%)

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperature berkisar 26°C–43°C. Pada periode bulan April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup angin barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi yaitu rata-rata kurang dari 1.750 mm, 1750-2000 mm, 2000-2500 mm, dan 2500-3000 mm.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Di sekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim hujan kurang dari 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Sungai Lekoballo.

4.2 Keadaan Demografi

Adapun keadaan demografi Kabupaten Bone akan diuraikan sebagai berikut :

4.2.1 Penduduk

Adapun gambaran tentang Jumlah penduduk Kabupaten Bone berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kabupaten Bone berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin.

Kode Wilayah Area Code	KeCamatan District	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Bontocani	15.549	15.681	15.326	15.350	15.443
020	Kahu	35.801	36.118	37.042	37.399	37.739
030	Kajuara	31.950	32.233	34.034	34.599	35.054
040	Salomekko	13.774	13.897	14.272	14.970	15.112
050	Tonra	11.530	11.634	12.581	12.830	13.033
060	Patimpeng	14.634	14.764	15.470	15.670	15.894
070	Libureng	29.117	29.368	29.006	29.165	29.352
080	Mare	23.318	23.520	24.692	25.129	25.524
090	Sibulue	30.576	30.857	32.236	32.664	33.048
100	Cina	24.987	25.210	25.213	25.437	25.689
110	Barebbo	25.192	25.422	26.108	26.383	26.679
120	Ponre	13.016	13.130	13.126	13.198	13.365
130	Lappariaja	22.422	22.619	22.966	23.183	23.342
140	Lamuru	25.107	25.331	24.316	24.293	24.461
141	Tellu Limpoe	13.004	13.117	13.585	13.771	13.853
150	Bengo	26.022	26.250	25.234	25.247	25.305

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
160	Ulaweng	26.067	26.301	24.641	24.504	24.559
170	Palakka	21.430	21.627	21.917	22.084	22.223
180	Awangpone	28.964	29.230	28.523	28.583	28.784
190	Tellu Siattinge	42.056	42.435	39.891	39.733	39.821
200	Amali	22.036	22.239	20.666	20.546	20.591
210	Ajangale	28.831	29.095	27.316	27.203	27.263
220	Dua Boccoe	31.242	31.532	29.995	29.941	30.007
230	Cenrana	24.748	24.968	23.464	23.362	23.560
710	Tanete Riattang	37.266	37.594	42.354	43.512	44.700
720	Tanete Riattang	43.404	43.793	47.533	48.532	49.423

730	Barat Tanete Riattang Timur	37.431	37.752	39.786	40.393	41.081
JUMLAH		699.474	705.717	711.293	717.681	724.905

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka 2012

Tabel 4.2. menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bone tahun 2009 sebanyak 711.293 jiwa, kemudian naik menjadi 717.681 jiwa pada tahun 2010 yang terdiri dari laki-laki 341.614 jiwa dan perempuan sebanyak 376.068 jiwa dengan rasio jenis kelamin 90,84. Ini berarti bahwa dalam seratus penduduk perempuan terdapat 91 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk terbesar terletak di Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 48.532 jiwa, di susul Kecamatan Tanete Riattang Barat sebanyak 43.512 jiwa, kemudian Kecamatan Tanete Riattang Timur sebanyak 40.393 jiwa. Adapun jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tonra sebanyak 12.830 jiwa, kemudian Kecamatan Ponre sebanyak 13.198 jiwa, serta Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 13.771 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2009-2010 sebesar 0,83 persen.

4.2.2. Ketenagakerjaan

Untuk bergerakanya suatu roda pembangunan tenaga kerja menjadi suatu elemen penting. Dalam hal ini penduduk kemudian dibagi dalam dua kelompok yakni berdasarkan kelompok angkatan kerja dan penduduk kelompok bukan kerja. Adapun jumlah ketenagakerjaan akan

terus mengalami perubahan dengan berlangsung proses demografi. Bagian tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja.

Penduduk kelompok angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang selama seminggu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti yang sedang menunggu panen dan pegawai yang cuti. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharap dapat bekerja juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Penduduk kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Hasil survey Angkatan Kerja Nasional, pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Bone yang berumur 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja 64,67 persen. Dari jumlah tersebut, 85,02 persen adalah laki-laki dan 47,44 persen adalah perempuan. Bagian dari penduduk yang bukan angkatan kerja 35,33 persen terdiri dari 14,98 persen laki-laki dan 52,26 persen adalah perempuan. 21,66 persen dari bukan angkatan kerja sehari-harinya mengurus rumah tangga, 5,80 persen sekolah dan 7,87 persen melakukan kegiatan lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi penduduk. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas. TPAK penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Bone pada tahun 2010 sebanyak 64,67 persen.

Di lihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Bone bekerja di sektor pertanian sebanyak 77,17 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industry pengolahan sebanyak 21,58 persen dan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sector perdagangan hanya 2,58 persen.

4.2.3. Sosial, Budaya dan Agama

Dimasa lalu, KabupatenBone merupakan pusat kebudayaan bugis yang maju terutama di bidang perdagangan dan kelautan, ditandai dengan adanya jalur pelayaran dan perdagangan lintas nusantara bahkan lintas benua.Masyarakat dengan budaya wisatawan yang kental telah banyak yang menjadi pedagang yang sukses baik di dalam maupun di luar Sulawesi.

Keadaan sosial keagamaan dalam masyarakat Kabupaten Bone bahwa pemeluk agama terbesar adalah Islam sebanyak 694.828 orang (99,34%), disusul Protestan sebanyak 2.944 orang (0,41%), Katolik

sebanyak 541 orang (0,08%), Hindu sebanyak 596 orang (0,09%) dan Budha sebanyak 565 orang (0,08%). Dalam hal mengamalkan ibadahnya kemudian didukung oleh tempat ibadah di antaranya 1.175 Mesjid atau Mushollah, 3 Gereja dan 1 Pura.

4.3. Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riattang Barat

4.3.1 Aspek Fisik

4.3.1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah merupakan suatu wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone dan merupakan sentral Pemerintahan Kabupaten Bone. Adapun batas-batas Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah :

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanete Riattang Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Barebbo
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanete Riattang Barat
- Sebelah Utara : Kecamatan Awangpone

Bentuk batas-batas wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat lebih banyak ditandai dengan batas-batas jalan. Secara administratif Kecamatan Tanete Riattang Barat terdiri dari 8 Kelurahan. Sedangkan Kelurahan-Kelurahan tersebut adalah, sebagai berikut :

- Kelurahan Majang.
- Kelurahan Macege.
- Kelurahan Jeppe'e.

- Kelurahan Macanang.
- Kelurahan Mattirowalie.
- Kelurahan Bulutempe.
- Kelurahan Watang Palakka.
- Kelurahan Polewali.

4.3.2. Kondisi Topografis

Bilamana kita simak sepintas maka secara geografis Kecamatan Tanete Riattang Barat mempunyai fisiologi mendatar atau merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan air laut. 90% wilayahnya adalah daerah pemukiman dan adanya pembangunan infrastruktur yang mengarah ke bagian Kelurahan Macanang.

4.3.3. Kondisi Hidrologi

Sebagaimana dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yang terletak di daerah tropis, maka di Kecamatan Tanete Riattang Barat kita mengenal adanya dua kali pergantian musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang berkisar antara bulan November s/d bulan April dan musim kemarau yang berkisar antara bulan Mei s/d Oktober, dimana waktu-waktu tertentu sering mengalami perubahan, yaitu maju dan mundur dari prakiraan cuaca yang diramalkan. Curah hujan yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat belum dapat di kemukakan

secara pasti karena belum tersedianya peralatan yang memadai untuk mencatat melakukan penelitian tentang curah hujan tersebut.

4.3.4 Kondisi dan Penggunaan Tanah di Kecamatan Tanete Riattang Barat

Jenis tanah di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat sesuai dengan lokasi adalah bervariasi dari jenis tanah padas dan pekat, tanah liat hitam dan merah. Adapun tanah merah berada di sebagian wilayah utara yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan (batu batu merah). Jenis tanah liat hitam kebanyakan kita jumpai di daerah dataran rendah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian namun memiliki sifat-sifat labil dan pada musim kemarau terdapat keretakan-keretakan.

4.3.5. Demografi / Kependudukan

Seperti halnya dengan kondisi geografis, maka keadaan demografi suatu wilayah juga merupakan suatu faktor yang amat menentukan dan penting serta perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pembangunan.

Jumlah penduduk Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Kelurahan Majang laki-laki sebanyak 1.299 jiwa dan perempuan sebanyak 1.353 jiwa jumlah 2.653 jiwa.

- Kelurahan Macege laki-laki sebanyak 7.406 jiwa dan perempuan sebanyak 7.867 jiwa dengan jumlah 15.273 jiwa.
- Kelurahan Jeppe'e laki-laki sebanyak 3. 849 jiwa dan perempuan sebanyak 4.010 jiwa dengan jumlah 7.859 jiwa.
- Kelurahan Macanang laki-laki sebanyak 4.838 jiwa dan perempuan sebanyak 5.049 jiwa dengan jumlah 9.887 jiwa.
- Kelurahan Mattirowalie laki-laki sebanyak 2.026 jiwa dan perempuan sebanyak 2.079 jiwa dengan jumlah 4.015 jiwa.
- Kelurahan Bulutempe laki-laki sebanyak 3.170 jiwa dan perempuan sebanyak 3.493 jiwa dengan jumlah 6.663 jiwa.
- Kelurahan Watang Palakka laki-laki sebanyak 1.158 jiwa dan perempuan sebanyak 1.397 jiwa dengan jumlah 2.505 jiwa.
- Kelurahan Polewali laki-laki dengan jumlah 1.135 jiwa dan perempuan sebanyak 1.153 jiwa dengan jumlah 2.288 jiwa.

4.3.6. Sektor Keamanan

Kondisi keamanan di Kecamatan Tanete Riattang Barat cukup baik dan sangat kondusif terbukti dari adanya tindak kriminalitas yang cukup rendah selama ini . Aparat keamanan di samping dari instansi yang berkewajiban polisi dan TNI dibantu oleh Polisi Pamong Praja dan masyarakat umum baik yang tergabung dalam wadah Hansip/Linmas maupun secara perorangan dalam bentuk Siskamling / siskam

swakarsa. Selanjutnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat sudah ada kantor Polsek yang terdapat di Kecamatan Tanete Riattang.

4.3.7. Sektor Pemerintahan

Sedangkan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat telah dilengkapi dengan Dinas / Instansi meskipun belum dimantapkan status kelembagaannya / masih dirangkap dengan Kecamatan lain.

4.3.8. .Aspek Perekonomian

Gambaran berbagai sektor perekonomian yang disesuaikan dengan situasi Kecamatan Tanete Riattang Barat yang diakibatkan dari bentuk wilayah yang ada serta kondisi daerah setempat, sehingga mengakibatkan adanya berbagai jenis mata pencaharian dalam masyarakat guna menunjang roda perekonomian.

- 1) Fasilitas Perdagangan dan koperasi perdagangan di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat nampak aktivitasnya karena terdapatnya pasar dan pertokoan yang telah di bangun yang terdapat di belakang terminal PETTA PONGGAWAE . tetapi pasar ini belum terlalu ramai di karenakan lokasi pasar yang sebelumnya tepat pada pusat Kota jadi pasar ini masih berkembang sejalannya waktu.
- 2) Fasilitas Jasa Fasilitas jasa yang dibentuk oleh Pemerintah di Kecamatan Tanete Riattang Barat sangat memadai, terdapat

satu unit BRI , Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI dan 2 Perum Pegadaian. Terdapat juga 1 unit BPR Swasta. Sedangkan kantor Pos dan Giro masih menjadi satu dengan Kecamatan Palakka, Tanete Riattang Barat, dan Timur.

4.4. Gambaran Umum Kelurahan Macanang

Batas- batas Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat

- Sebelah utara : Kelurahan Mattiro Walie.
- Sebelah timur : Kelurahan Jeppe'e.
- Sebelah selatan : Kelurahan Bulutempe/ Kelurahan Majang.
- Sebelah barat : Kelurahan Majang.

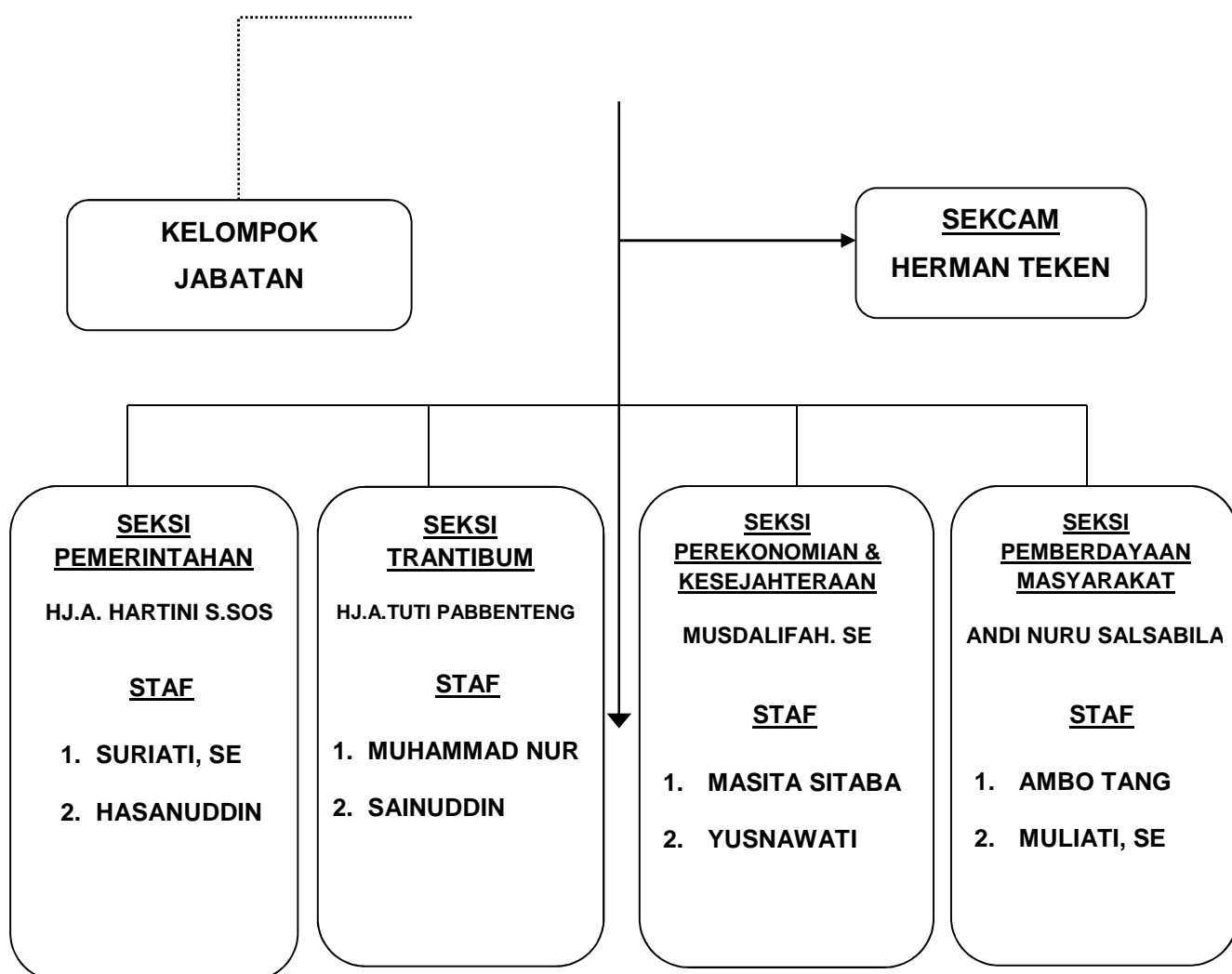
Nama-nama Kepala Lingkungan di Kelurahan Macanang

- Kepala Lingkungan Pabbacue : A. Aspada
- Kepala Lingkungan Bila-Bila'e : A. Kasim takdir
- Kepala Lingkungan Lasotanae : Muhammad Jamil
- Kepala Lingkungan Macanang : Hasanuddin
- Kepala Lingkungan Coppoliang'e : Muh. Nur, SE.

Gambar 4.4
Struktur organisasi Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat

KEPALA KELURAHAN

Muhammd Aspar, S.H.



*Sumber data: Struktur organisasi Kelurahan Macanang April 2012

4.5. Gambaran Umum Kelurahan Bulutempe

Batas-batas Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat

yaitu:

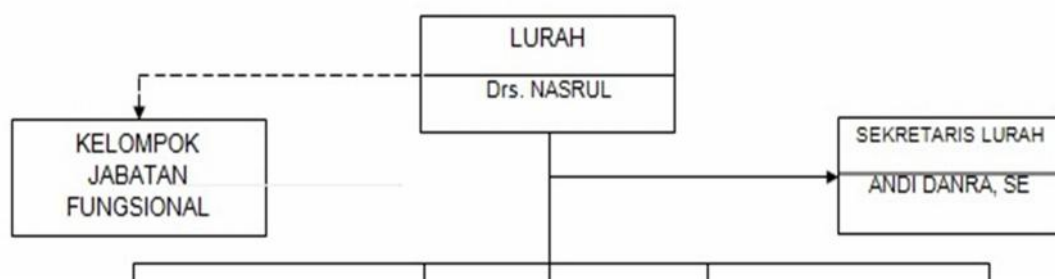
- Sebelah Utara : Kelurahan mattirowalie
- Sebelah Timur : KelurahanMacanang
- Sebelah Selatan : Kelurahan majang
- Sebelah Barat : DesaTirong/ DesaPasippo dan DesaWatang Palakka.

Kelurahan Bulutempe terdapat 6 lingkungan yaitu :

- Lingkungan Waru
- Lingkungan Carawali
- Lingkungan Lagumbang
- Lingkungan Welalange
- Lingkungan Sinri

Jumlah penduduk di Kelurahan Bulutempe adalah 6674 orang yang terbagi jumlah laki-laki sebanyak 3183 orang, perempuan sebanyak 3491 orang, jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Bulutempe adalah 1548 orang.

Gambar 4.3
Struktur organisasi Kelurahan Bulutempe KecamatanTanete Riattang Barat



4.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.4.1. Pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

Raskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu, Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam hal ini program beras untuk rakyat miskin dilaksanakan secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Indonesia yaitu melalui dari pusat dengan adanya Kemenko Kesra RI 2012 tentang pedoman umum penyaluran Raskin, melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, kemudian Kelurahan Bulutempe dan Kelurahan Macanang hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat, adapun proses penyaluran beras untuk masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tahapan Proses penyaluran Beras untuk rakyat miskin (Raskin)

Tahap	Wilayah	Pelaku/ Penanggung jawab
Tahap I	Pusat	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Menteri koordinator di

		bidang Kesejahteraan Rakyat
Tahap II	Provinsi	Tim Koordinasi RaskinProvinsi,Gubernur
Tahap III	Kabupaten	Tim Koordinasi RaskinKabupaten, Bupati
Tahap IV	KeCamatan	Tim Koordinasi RaskinKecamatan, Bupati/ Walikota
Tahap V	Kelurahan	Tim Koordinasi RaskinKelurahan,Kepala Desa atau Lurah atau kepala pemerintah setingkat
Masyarakat Penerima Raskin		

a. Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin pada tingkat Pusat

Instruksi Presiden tentang kebijakan beras nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya menguatamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2013. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal maka Pemerintah Provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Pemerintah Kabupaten /Kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan PedumRaskin. Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan program Raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah Daerah.

Sasaran Raskin tahun 2013 adalah 17,48 juta rumah tangga sasaran (RTS) sesuai dengan hasil pendataan perlindungan sosial tahun 2012 (PPLS-11) BPS. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2012 tentang APBN 2013, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2013 yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No. 7 tahun

2009 tentang perberasan menetapkan Perum BULOG sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin, adapun yang bertanggung jawab pada distribusi beras untuk rakyat miskin adalah Tim Koordinasi Raskin Pusat:

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat.

1. Tugas :

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan ,penganggaran ,sosialisasi ,penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin
- b. Penetapan Pagu Raskin
- c. Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin.
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kepmenko Kesra) No.57 Tahun 2012, Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri atas: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri; Wakil Ketua V/Bidang Pengendalian dan Pelaporan adalah Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat

BPKP. Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, BPKP, dan Perum BULOG.

b. Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Provinsi

Setelah Tim Koordinasi Raskin Pusat melaksanakan tugas dan fungsinya maka selanjutnya menjadi tugas dari Tim koordinasi Raskin Provinsi disini Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Tugas: Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
3. Fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Provinsi.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Raskin).
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- f. Penanganan Pengaduan di Provinsi.
- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota.
- h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Tim Koordinasi Raskin

Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di Provinsi, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPSProvinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Kantor Perwakilan BPKP, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kabupaten

Adapun yang bertanggung jawab dalam pengaturan serta distribusi Raskin pada tingkat Kabupaten ketingkat Kecamatan adalah Bupati/ Walikota dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
- f. Perencanaan penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan pengaduan.

- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
 - k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.
 5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten /Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/ Dinas/ Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di Kab/Kota, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Distribusi bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kabupaten adalah untuk mengetahui seberapa besar kuota beras yang ada untuk selanjutnya dapat di distribusikan kepada Kecamatan-Kecamatan yang ada pada Kabupaten Bone dalam hal ini terdapat

seberapa besar jumlah rumah tangga miskin yang harus menerima Raskin tersebut berdasarkan wawancara dengan Kepala sub bagian Bina Perekonomian Anwar Sahude mengatakan:

“Permintaan alokasi sesuai dengan jumlah Pagu di Kabupaten Bone yang sebesar 60.603 RTM di buat dalam hal ini Bupati atau yang di tunjuk oleh Bupati sendiri menandatangani surat tersebut dan di bawa ke Kepala Bulog yang di beri wewenang untuk mengkonfirmasi adanya Pagu ini yang terletak di Kabupaten wajo, dan kemudian pihak bulog mengeluarkan DO, DO ini kemudian di berikan ke Kepala Gudang yang ada di Kabupaten Bone di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri dan selanjutnya kepala gudang bulog yang mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan beras ke Kelurahan atau Desa di Kabupaten Bone yang sudah tertera jumlah beras yang akan di bagikan di dalam Pagu tersebut “(*pada tanggal 3 april 2013*)

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Bina Perekonomian Kabupaten Bone maka terdapat informasi bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per-Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Bone bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Bone dialokasikan beras sebanyak 10.908.540 kilogram untuk penyaluran selama 12 (dua belas) bulan kepada 60.603 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM), yang kemudian akan disalurkan kepada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

Adapun beras yang berasal yang di distribusikan oleh Perum BULOG kepada Rumah Tangga Miskin Sasaran (RTMS) Raskin semuanya berasal dari para petani yang ada di Kabupaten Bone itu

sendiri informasi tersebut di peroleh melalui wawancara dengan Kepala Gudang Bulog Kabupaten Bone Andi Muliadi Sebagai berikut:

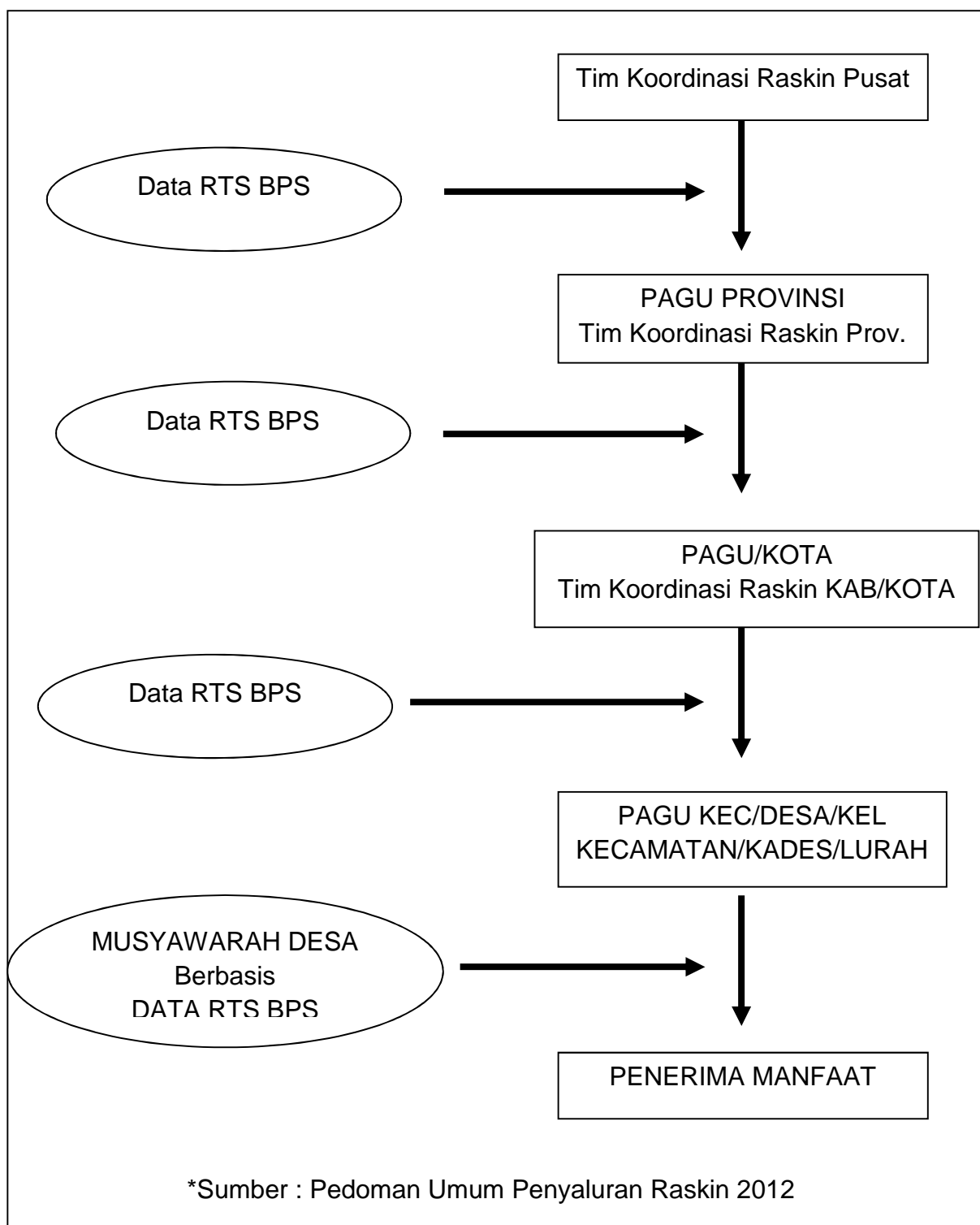
“Beras yang di distribusikan ke berbagai Kelurahan/Desa di Kabupaten Bone berasal dari Bone sendiri yang di beli dari petani lokal dari berbagai Kecamatan sesuai dengan jadwal panen oleh Pemerintah daerah dengan harga normal sesuai dengan harga pasar dan kemudian di subsidi oleh Pemerintah dan menjadi beras yang nantinya menjadi beras Raskinyang akan di bagikan lagi kepada para warga penerima Raskin. Terdapat beberapa ton beras yang siap di bagikan ke berbagai Kelurahan/ Desa yang sudah di simpan di gudang selama kurang lebih 2 tahun”. (*pada tanggal 4 April 2013*)

Data di atas di dukung juga oleh hasil wawancara dengan seorang petani yang secara berskala menjual hasil panennya kepada Perum BULOG di Kabupaten Bone adalah Kammude.

“Pada setiap musim panennya hasil pertanian yang kami garap sepenuhnya kami jual kepada Perum BULOG hal itu di karenakan kami diberi harga yang cukup baik dari pada menjualnya kepada pengumpul yang lainnya, dan hal tersebut sudah kami lakukanselama beberapa tahun belakangan ini, walaupun kami sendiri tidak tau kalau beras tersebutlah yang oleh Pemerintah di jadikan beras untuk rakyat miskin (Raskin).” (*pada tanggal 4 April 2013*).

Hal tersebur dapat diartikan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional., dengan pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan Perum BULOG, dengan cara memafaatkan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan akan pemenuhan pangan di indonesia sehingga Pemerintah bisa tetap konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan program Raskin, bukan untuk pasar bebas.

Bagan Perencanaan Penyaluran Raskin



d. Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kecamatan

Lebih lanjut setelah tim koordinasi Raskin Kabupaten selesai menjalankan tugas dan fungsinya maka stok beras untuk masyarakat miskin tersebut di serahkan kepada pihak Kecamatan yang selanjutnya akan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dimana Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin diKecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayahKecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.

- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan setingkat.
 - f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
 - g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan(KSK).

Fokus dalam penelitian ini berada pada Kecamatan Tanete Riattang Barat sehingga yang menjadi sumber informasi berada pada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tanete Riattang Barat itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya setelah menerima stok beras untuk masyarakat

miskin (Raskin) dari pihak Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang telah memberikan jatah yang dapat dilihat pada tabel 4.4:

Tabel 4.4
Pagu alokasi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat

No	Kelurahan	Jumlah RTSM	Jumlah Beras (Kg)
1	Majang	293	4.395
2	Macege	275	4.125
3	Jeppe'e	137	2.055
4	Macanang	248	3.720
5	Mattiro Walie	226	3.390
6	Bulutempe	315	4.725
7	Watangpalakka	192	2.880
8	Polewali	201	3.015
Jumlah		1.887	28.305 kg/bulan

Sumber: Lampiran Pagu Alokasi Raskin Bupati Bone 2013

Adapun alokasi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam 1 tahunnya adalah 28.305 Kg x 12 Bulan adalah 339.660 Kg, yang terjadi pada tahun 2013, dan dapat juga dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5
Pagu alokasi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kecamatan
Tanete Riattang Barat perbulannya pada Tahun 2013

Bulan	Jumlah Beras (Kg)	Jumlah Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin 1.887
Januari	28.305	
February	28.305	
Maret	28.305	
April	28.305	
Mei	28.305	
Juni	28.305	
Juli	28.305	
Agustus	28.305	
September	28.305	
Oktober	28.305	
November	28.305	
Desember	28.305	
Jumlah	339.66	

Sumber: Lampiran Pagu Alokasi Raskin Bupati Bone 2013

Tabel 4.5 menunjukkan alokasi beras yang dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat, adapun yang menjadi penanggung jawab penuh dalam alokasi Raskin di Kecamatan Tanete Riattang Barat tersebut adalah Camatnya yang bertugas selanjutnya bertugas untuk mendistribusikannya kepada setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat, adapun cara atau mekanisme yang digunakan oleh Camat tersebut dapat dilihat pada wawancara dengan Camat Tanete Riattang Barat Andi Sirnang.

“Beras Raskin yang telah kami terima dari Pemerintah Kabupaten Bone melalui Perum BULOG sebanyak 28.305 Kg/bulannya selanjutnya di beritahukan kepada setiap Lurah yang ada di Tanete Riattang Barat untuk dibahas dan di bagikan sesuai dengan jumlah Rumah tangga miskin sasaran, sehingga dalam

hal ini kami hanya menjadi fasilitator bagi Kelurahan untuk mengkoordinir pembagian Raskin agar sesuai dengan jatah masing-masing Kelurahan”. (*Pada Tanggal 3, April 2013*)

Hasil wawancara diatas telah memberikan gambaran bahwa pihak Kecamatanpun berperan dalam hal memfasilitasi atau menjadi jembatan bagi pihak Kelurahan untuk berhubungan dengan pihak Perum BULOG dalam hal pengambilan jatah sesuai dengan Pagu yang diterima oleh pihakKecamatantentang jumlah alokasi beras Raskin yang Kelurahan peroleh berdasarkan Pagu tersebut.

Sehingga pada setiap jatuh tempo pihak Kecamatan selalu mengingatkan kepada Tim koordinasi yang ada di Kelurahan yang bertanggung jawab untuk segera meminta Perum BULOG untuk segera mendistribusikan jatah beras untuk masyarakat miskin, sesuai Pagu dan surat pengantar dari Kelurahan selanjutnya oleh pihak Perum BULOG langsung mendistribusikan kesetiap Kelurahan masing-masing tidak melalui Kecamatanlagi untuk lebih efektif dan efisiensi waktu dan biasa, pihak Kecamatanpun dalam hal ini sering berkoordinasi dengan pihak Kelurahan terutama dalam hal mengenai berapa jumlah Rumah tangga miskin sasaran Raskin, dan berapa jumlah beras yang mereka terima.

e. Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kelurahan

Adapun pada tahap akhir proses distribusi beras untuk rakyat miskin sebelum tersalurkan kepada masyarakat berada pada pihak

Kelurahan yang selanjutnya akan membentuk Tim koordinasi Raskin Kecamatan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG.

Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Adapun satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivreg/Kasubagdivreg/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya .

Dan adapun Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden (Bank yang ditunjuk oleh Divreg/subdivreg/Kansilog) atau menerima tanda bukti setor pembayaran HBD Raskin.

Dikarenakan penelitian ini mengambil 2 (Kelurahan) sebagai sample dalam penelitian ini maka pembahasan hasil penelitian implementasi program beras untuk rakyat miskin di Kecamatan Tanete Riattang Barat di fokuskan terhadap Kelurahan Macanang dan Kelurahan Bulutempe yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin di Kelurahan Macanang

Pelaksanaan proses distribusi beras Raskin sepenuhnya akan berakhir ketika beras tersebut telah beradah ditangan pihak Kelurahan yangselanjutnya akan mulai untuk mendistribusikannya/dijual kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada, adapun jumlah beras dan Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin berdasarkan Tabel 4.2 diatas untuk Kelurahan Macanang yang memiliki RTMS Raskin sebanyak 248 keluarga, maka akan memperoleh jata beras sebanyak 3.720 Kg, yang kemudian oleh Tim Koordinasi Raskin Kelurahan di lakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar segera melakukan pembelian kepada pihak Kelurahan jika namanya termaksud dalam daftar nama penerima Raskin, seperti hasil wawancara yang diperoleh dari seorang warga penerima Raskin Nuru'

“Hampir setiap bulannya staf dari Kelurahan memberitahukan kepada kepala Lingkungan tentang alokasi Raskin yang ada di KelurahanMacanang, yang kemudian memberitahukan kepada setiap masyarakat miskin untuk segera mengambil jatah beras mereka di kantor Kelurahan.” (*Pada Tanggal, 5 April 2013*)

Keaktifan serta fungsi dari Tim Koordinasi Raskin pada Kelurahan Macanang dalam hal sosialisasi beras Raskin sangat disambut baik oleh masyarakat dikarenakan dalam hal pelayanan serta informasi sangat mudah di alami dan di ketahui oleh masyarakat. Dan juga Mengingat jumlah masyarakat miskin yang terdaftar di Kelurahan

Macanang cukup sedikit dibanding dengan Kelurahan lainnya sehingga masyarakat tidak perlu antri atau berdesak-desakan dalam mengambil jatah beras Raskin mereka dikantor Kelurahan.

- Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin di Kelurahan Bulutempe

Tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan distribusi beras Raskin di Kelurahan Macanang, pelaksanaan distribusi beras Raskin di Kelurahan Bulutempe juga di laksanakan sesuai dengan Pedoman Umum yang ada menurut dengan Pagu yang di keluarkan oleh BupatiBone yaitu Rumah Tangga Miskin penerima manfaat (RTS-PM) Sebanyak 315 Keluarga sehingga alokasi beras yang mereka terima sebanyak 4.725 Kg

Namun satu hal yang yang menjadi persamaan dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin di kedua Kelurahan tersebut adalah stok beras Raskin yang mereka terima dianggap kurang hal tersebut dikarenakan masyarakat miskin yang ada biasa menebus beras dengan harga yang telah di tentukan yakni Rp. 1600/kg tetapi masih ada saja warga yang termasuk rumah tangga miskin yang belum bisa mendapatkan beras di karenakan terbatasnya jumlah Pagu beras hal tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, bukan dari pihak Pemerintah Kelurahan yang mengetahui serta berhubungan langsung dengan masyarakatnya.

Adapun hasil dari penjualan beras kepada RTM-PM Raskin akan di kumpulkan dan disimpan oleh Tim Koordinasi Raskin Kelurahan yang selanjutnya melalui Kepala Kelurahan menyetorkan HPB Raskin kepada pihak Kecamatan yang selanjutnya mengumpulkan uang hasil pembelian beras Raskin dari setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat dan akhirnya akan diserahkan kepada Perum BULOG sebagai Konpensasi terhadap harga beras tersebut ke BULOG. Dan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Camat Tanete Riattang Andi Sirnang.

“Setiap bulannya kami selalu mengumpulkan hasil dari penjualan beras Raskin dari semua Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Barat, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Pihak Perum BULOG sebagai biaya konpensasi beras Raskin yang mereka salurkan kepada seluruh Kelurahan yang ada di Tanete Riattang Barat.” (*Pada Tanggal 3, April 2013*)

Informasi yang samapun diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Gudang Bulog Kabupaten Bone Andi Muliady Sebagai berikut:

“Pada akhir bulan kami selalu menerima dana hasil penjualan dari beras Raskin yang kami salurkan pada setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone ini begitupun dengan Kecamatan Tanete Riattang Barat, dimana setiap jatuh tempo Camat dari Tanete Riattang Barat, kadang kala di wakili oleh stafnya datang membawah iuran dana hasil penjualan Raskin di Kecamatan mereka” (*Pada Tanggal 4, April 2013*)

Berdasarkan informasi diatas kita dapat menerima gambaran bahwa hasil dari penjualan Raskin tersebut sepenuhnya dialokasikan kepada biaya yang dikeluarkan untuk membeli beras yang berasal dari petani

yang kemudian oleh Pemerintah disubsidi dimana rata-rata Perum BULOG membeli beras dari petani lokal sesuai dengan harga pasar beras di Kabupaten Bone. Dan oleh Pemerintah akan disubsidi sehingga mencapai harga sesuai Pagu yakni Rp. 1.600/Kg.

Harga Rp.1.600/kg inilah yang kemudian akan menjadi tarif bagi warga miskin penerima manfaat dan hasil penjualan tersebut dikumpulkan oleh pihak Kelurahan dan selanjutnya dari pihak Kecamatan akan menyetor kepada Perum BULOG, walaupun ada beberapa Kelurahan yang menunggak pembayaran kepada pihak Kecamatan hal tersebut dapat ditangani dengan biaya talangan yang terdapat di Kecamatan, biasanya hal tersebut di karenakan beras yang ada di Kelurahan tersebut belum habis terjual, atau adakalanya stok beras yang ada pada Perum BULOG terlambat untuk disalurkan kepada pihak Kelurahan, sehingga dalam hal ini peran pihak Kecamatan sangat diperlukan untuk mengkoordinasi serta mengawasi penyaluran beras untuk rakyat miskin tersebut, sehingga jikapun oleh Perum BULOG terjadi keterlambatan dalam mengantarkan stok beras pada Kelurahan maka oleh pihak Kecamatan hal tersebut di koordinasikan kepada pihak Perum BULOG untuk segera menyediakan stok beras yang dibutuhkan pada Kelurahan yang mengalami keterlambatan dalam proses pembagian beras.

4.4.2. Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam Proses Implementasi Program Raskin

Pada pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) mulai dari tahap Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan sampai pada saat sampai di tangan Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin tentu saja mengalami banyak masalah, dan oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin tersebut adapun masalah-masakah yang muncul pada pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran(*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin(*leakage*) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima Raskin(*undercoverage*), adapun beberapa faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran itu adalah:

1. Data penerima Raskin di tingkat Kelurahan karena data yang di gunakan adalah data yang di dikeluarkan oleh pihak BPS yang seharusnya bekerjasama pihak Kelurahan di mana disini pihak

Kelurahan akan tahu persis siapa saja warganya yang bisa di golongkan sebagai calon penerima Raskin hal tersebut tentu saja merugikan keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan Raskin tersebut.

2. Cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar rumah tangga miskin sehingga kadang kala menggunakan mekanisme random atau hanya melihat dari segi fisik masyarakat tersebut seperti kondisi rumah, harta benda, bahkan kendaraan padahal indikator tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam memberikan persepsi tentang kemiskinan.
3. Dalam kependudukan tentu saja sering terdapat fase atau proses fertilitas, mortalitas dan migrasi, yang tentu saja dapat mempengaruhi proses pendataan Rumah Tangga Miskin baik oleh Pihak BPS Kabupaten Bone atau oleh Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan Kelurahan sehingga ada kalanya data harus diperbaharui agar bisa dijadikan pedoman dalam pendistribusian Beras Raskin tersebut.
4. Prosedur penyaringan rumah tangga miskin (RTS) tidak dilakukan secara seksama hal tersebut dikarenakan data masyarakat miskin diambil dari hasil survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone yang dilaksanakan dalam kurung 5 tahun sekali yaitu pada Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015, jadi data RTS yang dipakai masih berasal

dari tahun 2010, padahal kemiskinan sendiri bersifat relatif artinya dalam kurung bulan sajan seseorang sudah bisa beralih dari miskin menjadi sejahtera, ataupun sebaliknya dari sejahtera hingga jatuh miskin.

5. Dari pihak Pemerintah Kecamatan kadangkala tidak jeli dalam melihat atau mendata masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat Raskin, sehingga sering terjadi kesalahan ada kalanya masyarakat yang tidak tergolong miskin juga ikut menikmati beras Raskin tersebut.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Camat Tanete Riattang Barat Andi Sirnang.

“Iya, saya paham siapa-siapa yang seharusnya mendapat bantuan Raskin, yaitu orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi warga di sini semua minta jatah beras, dan oleh karena itu Seharusnya Pemerintah memberi wewenang ke pihak Kecamatan dan di bantu oleh pihak Kelurahan dalam menentukan penerima Raskin, adapun Cara penentuan penerima Raskin adalah datangi rumahnya, berapa jumlah anaknya, dan tanyakan sumber penghidupannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian jatah Beras Raskin tersebut.”(*Pada tanggal 28 maret 2013*)

Demikian juga yang dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan Macanang Malik

”penerima Raskin di fokuskan pada sasaran yang di golongan miskin sekali, di karenakan kemiskinan bersifat majemuk jadi di Kelurahan Macanang warga yang betul-betul di golongan miskin sekali yang diutamakan dan apabila masih ada kuota yang tersisa maka akan di sisakan kepada golongan kedua yakni miskin.tapi sebelumnya pihak Kelurahan masih berpedoman pada data dari

BPS Kabupaten Bone karena sebagai pihak yang di beri wewenang dari Pemerintah pusat dan pihak Kelurahan yang mengkaji ulang atau merevisi kembali data dari BPS dengan menunjuk salah satu dari pihak Kelurahan dan di bantu oleh kepala Lingkungan atau RT/RW setempat yang di anggap mengetahui kondisi riil yang ada di lapangan “.(pada tanggal 3 april 2013)

Sedangkan oleh warga Seperti di Kelurahan Macanang sendiri memiliki pendapat yang hampir sama seperti wawancara dengan Macita yang mengatakan bahwa

“Pada proses pelaksanaan Raskin di Kelurahan Macanang sudah bagus tapi masih ada Kepala Keluarga yang tidak masuk daftar penerima Raskin padahal bisa di katakan mereka tergolong miskin ”(Pada Tanggal 5 April 2013)

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat paham siapa sasaran Raskin (RTS) akan tetapi karena kondisi masyarakat, maka para pelaksana berdasarkan kesepakatan warga mengambil kebijakan untuk membagi rata jatah Raskin pada semua warga. Pembagian jatah Raskin secara merata ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kesalahan dalam proses pendataan terhadap keluarga miskin. Persoalan akan muncul apabila terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Ketika jatah Raskin didasarkan pada sistem alokasi maka akan terjadi mekanisme pengurangan jumlah beras yang diterima akan tetapi kemungkinan akan terjadi penurunan kualitas beras yang dibagikan.

tingkat ketepatan sasaran Raskin dapat dievaluasi, baik di tingkat kewilayahan maupun di tingkat rumah tangga. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa setiap ukuran yang digunakan dalam mengevaluasi ketepatan sasaran akan memberikan hasil yang berbeda, Keragaman pengukuran ketepatan sasaran dapat dijelaskan jika diketahui dengan tepat konsep dan metode pengukuran kemiskinan pembanding yang digunakan serta unit/tingkat analisisnya.

Penentuan RTS yang dapat menerima Raskin sudah diputuskan oleh Kelurahan yaitu dari BPS, berupa kartu yang sudah ada nama dan alamatnya, Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat Raskin, Sebaliknya warga yang cukup mampu mendapatkan kartu sehingga terjadi keresahan, Untuk mengatasi masalah ini Ketua RW berperan dalam mengatur pembagian Raskin kepada warganya.

b. Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin

Koordinasi tentu sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan hal tersebut di upayakan agar terdapat pembagian kerja yang jelas sehingga tidak terjadi timpang tindih fungsi dan tugas masing-masing bidang, dan Secara umum koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Raskin dinilai lemah, Indikasinya antara lain:

- a. Dokumen dari pusat tentang Raskin biasa mengalami keterterlambatan untuk selanjutnya diserahkan ke Pemda;

- b. Pendataan rumah tangga miskin dilakukan sebelum Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin keluar;
- c. Rakor tingkat menteri Bidang Kesra kurang tepat dalam menafsirkan Inpres tersebut, yakni tugas Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan berubah menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan.

Oleh karenanya, salah satu fungsi Pemda sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Raskin tidak dilakukan dan sebagian pemda merasa tidak dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan Raskin, Sebagian pemda juga mempertanyakan komitmen Pemerintah pusat atas pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah karena Raskin bersifat sentralistik dan dilaksanakan oleh institusi yang juga sentralistik (Bolog dan Kecamatan), Sifat tertutupan proses pendataan dan penetapan penerima Raskin dirasakan bertentangan dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun. Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Tanete Riattang Barat Andi Sanuddin.

“Dalam penyaluran beras Raskin seharusnya pihak Kelurahan selalu melaporkan setiap kegiatan yang mereka laksanakan termaksud kapan berasnya datang, berapa jumlah berasnya, hingga masalah apa saja yang mereka dapatkan, namun pihak Kelurahan hanya datang sekali itupun hanya untuk menyeter uang hasil penjualan dari beras Raskin tersebut”. (Pada Tanggal 3 April 2013)”

Pada dasarnya kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program Raskin yang diserahkan kepada Bulog dan Pemerintah daerah merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program ini, Persoalan kemudian muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para pegawainya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, sementara kemiskinan merupakan persoalan yang berdimensi jamak dan memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan politik secara komprehensif. Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Kepala Gudang Perum BULOG Andi Muliadi:

“Terus terang saja kami dari Perum BULOG kadang kala merasa kewalahan karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Kabupaten, Kelurahan, Hingga Pada pihakKecamatan, hal tersebut dikarenakan kadang kala pihak Kelurahan yang langsung turun tangan meninjau distribusi beras tersebut tanpa melibatkan pihakKecamatansehingga ketika kami melapor hasil pengiriman ke sejumlah Kelurahan yang ada kepihakKecamatan, mereka justru heran karena sebelumnya belum menerima laporan dari pihak Kelurahan”.(Pada Tanggal 3 April 2013)

Adanya miskomunikasi atau salah pengertian yang terjadi antara pelaku proses distribusi Raskin ini merupakan sesuatu yang harus segera diselesaikan mengingat keberhasilan dari kegiatan ini sepenuhnya tergantung terhadap kerja sama yang baik antara lembaga yang ada baik itu dari pihak Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten dan tentu saja pada Perum Bulog itu sendiri, sehingga dalam hal ini sangat disarankan dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus selalu disertai dengan rapat koordinasi yang mungkin dilaksanakan sebulan sekali antara semua pelaku kegiatan

juga disertai dengan rapat evaluasi untuk meninjau bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut termaksud menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi lalu mencoba untuk memberikan cara alternatif pemecahan masalah tersebut.

c. Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin.

Pengawasan dalam hal ini mengacu pada pelaksanaan monitorin oleh pihak otoritas yang memiliki wewenang dalam proses penyaluran beras untuk rakyat miskin tersebut, yaitu pusat kepada Provinsi, Provinsi kepada Kabupaten, dan seterusnya hingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap pelaksanaan distribusi beras Raskin oleh pihak Kelurahan kepada masyarakat.

Adapun masalah yang peneliti dapatkan dalam pengawasan terhadap pendistribusian beras Raskin dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian Anwar Sahude.

“Kami dari pihak Kabupaten sering memberitahukan kepada pihak Kelurahan, dan Kecamatan atau otoritas dari Kabupaten sendiri untuk secara berskala melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada masyarakat namun kadang kala pihak Kecamatan sendiri sering beranggapan bahwa mereka hanya memfasilitasi Kelurahan dalam hubungannya dengan jatah beras dan penyetoran hasil penjualan beras tersebut tanpa mencoba mengetahui bagaimana pelaksanaan distribusi beras Raskin oleh pihak Kelurahan terhadap masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat tersebut”. (Pada Tanggal 3 April 2013)

Pada permasalahan koordinasi yang tidak jelas antara pelaku proses distribusi beras Raskin bisa juga dikarenakan adanya timpang tindih tugas dan fungsi sehingga kadangkala terjadi kemajemukan terhadap tugas yang seharusnya mereka kerjakan di karena setiap pihak saling mengharapkan antara satu dengan yang lainnya adapun yang sering menjadi korban dalam hal ini adalah Rumah Tangga Miskin sasaran Raskin yang tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pelaksanaan distribusi beras, pernyataan tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan seorang warga penerima beras Raskin Naing.

“Kami dari masyarakat Kelurahan Bulutempe kadang kala merasa pusing dari pihak Kelurahan dan Kecamatan, karena tidak terdapat kejelasan informasi, ketika saya bertanya ke pihak Kelurahan tentang distribusi beras Raskin justru mereka menyuruh kami untuk meminta keterangan ke pihak Kecamatan dan begitupun sebaliknya pihak Kecamatan kembali menyuruh kami ke Kelurahan dikarenakan Kelurahan yang menjadi stok penyimpanan beras Raskin tersebut”. (Pada Tanggal 4 April 2013).

Sehingga dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan mengakibatkan munculnya masalah lain seperti hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Macanang Malik.

“Masyarakat Miskin penerima Raskin tersebut yang kebanyakan berprofesi sebagai petani justru beras yang mereka beli dijual kembali kepada pihak pengumpul dengan harga Rp. 4.500, hal tersebut dikarenakan mereka memiliki stok beras di rumah masing-masing yang berasal dari persawahan milik mereka sendiri”. (Pada Tanggal 4 April 2013).

Sehingga dari hasil penelitian ini jelas sudah dengan tidak adanya pengawasan yang jelas dari pihak yang memiliki otoritas dalam

penyaluran beras Raskin justru malah menimbulkan sumber masalah baru pada proses penyaluran beras Raskin kedepannya, dan oleh karena itu peran seluruh aparat Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dan instansi yang terkait dalam proses penyaluran Raskin harus lebih di optimalkan.

d. Kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran Raskin.

Permasalahan yang muncul menyangkut pentargetan dan penyaluran Program Beras Miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Hasil wawancara penulis dengan Riadi sebagai Kasi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre I Kabupaten Bone, menyatakan

"Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran Pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya ke masyarakat hanya tentang rencana pendataan".(Pada Tanggal 3 April 2013)

. Di sini seharusnya dari pihak Kecamatan atau Kelurahan memberikan wewenang pada masing-masing RT RW atau Kepala Lingkungan yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam menentukan siapa saja warga yang berhak menjadi RTS dan minimnya sosialisasi pada tahap pendataan dapat mengurangi munculnya *moral hazard* dalam penentuan target. Di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.

Secara kelembagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai penanggung jawab sosialisasi Nasional hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu seharusnya dapat di upayakan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa melalui spanduk atau selebaran dan juga televisi Kabel lokal yang biasanya menyiarkan kegiatan- kegiatan Pemda atau masyarakat yang sudah ada di Kabupaten Bone.

Upaya penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat, jumlahnya terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum. Selain itu, kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantauan program juga tidak berjalan di semua wilayah. Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga terjadi variasi jalur pengaduan. Adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program, telah memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat.

4.4.3. Konsep Pengelolaan Raskin ke Depan

Dalam membahas kebijakan program Raskin, penulis cenderung memilih teori dari Merilee S Grindle karena teori tersebut sesuai dengan

kebutuhan dari kebijakan program Raskin yang lebih membahas masalah-masalah manajerial. Berdasarkan buku panduan umum Raskin keberhasilan pelaksanaan program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6 tepat :

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Raskin hanya diberikan kepada RTS, dari data BPS yang telah diverifikasi dalam pertemuan tingkat Desa/Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada warga yang tidak mendapatkan beras dan masih tergolong miskin disebabkan oleh jumlah Pagu yang sudah ditentukan di karenakan jumlah rakyat yang termasuk dalam golongan miskin di setiap Kelurahan jumlahnya relatif.

2. Tepat Jumlah: Tiap RTS mendapatkan 15 kg per bulan selama 12 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam pembagian jumlah beras kepada RTS.
3. Tepat Harga; yaitu Rp 1.600/kg di titik distribusi. Hasil penelitian tiap RTS membayar beras Raskin sesuai dengan harganya dan di berikan kartu kontrol dari pihak Kelurahan sebagai kartu kontrol setiap bulannya.
4. Tepat Waktu yaitu sesuai dengan rencana (jadwal) distribusi. Hasil penelitian :distribusi beras ke RTS biasa terlambat sebab Perum BULOG terlambat dalam proses pendistribusiannya ke Kelurahan

sehingga pihak Kelurahan biasanya memberi jatah beras dengan dua kali pada bulan selanjutnya.

5. Tepat Administrasi; terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Hasil penelitian: baik warga maupun Pemerintah tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran kepada Perum BULOG.
6. Tepat Kualitas: kondisi beras baik, sesuai dengan standar kualitas beras Pemerintah. Hasil penelitian beras askin yang dijual kepada masyarakat merupakan beras dengan kualitas yang baik karena beras berasal dari persawahan milik petani di Kabupaten Bone itu sendiri,

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan fakta hasil penelitian telah mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa implementasi program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan, Hal ini ditandai dengan kurangnya antusiasme warga miskin sasaran Raskin yang menyambut baik program ini, dimana hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah selaku pelaksana Teknis kegiatan penyaluran beras Raskin tersebut baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Kelurahan hingga sampainya ketangan masyarakat miskin, termaksud juga kurangnya peran baik dari Perum BULOG itu sendiri yang menyediakan stok beras serta mendistribusikan kepada Kelurahan.

Adapun permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang adalah sebagai berikut: *Pertama*, Penetapan Daftar nama-nama RTMS Raskin yang tidak sesuai, *Kedua*, Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin, *Ketiga*, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran

Raskin, dan *yang terakhir*, Kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran Raskin.

5.2. Saran

Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) dalam pelaksanaannya tentunya banyak menghadapi tantangan dan hambatan-hambatan yang perlu dibenahi untuk pelaksanaan program selanjutnya. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran untuk pelaksanaan program berikutnya:

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin Masyarakat yang menjadi sasaran utama program, maka dari itu tingkat sosialisasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang konsep beras Raskin tersebut, begitupun juga dengan Pemerintah Daerah yang menjadi pelaku utama pendistribusian Beras Raskin untuk masyarakat miskin tersebut.
2. Dalam pelaksanaan program ini perlu adanya jalur koordinasi yang jelas baik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan juga dengan Perum BULOG sebagai penyedia stok beras Raskin, agar nantinya tidak terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih kepentingan antara Lembaga tersebut.
3. Diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya terdapat kontrol atau pengawasan oleh pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, L.W. 2010). *Efektifitas dan Efisiensi Distribusi Raskin Perum BULOG Divre Kalimantan Timur di Kota Balikpapan*. Tesis PS S2 MMA UGM (tidak dipublikasikan).
- BULOG. 2010b. *Studi Evaluasi Raskin: Kritik dan Pujian Sejak Awal Diluncurkan Sampai Sekarang (1998-2004)*. <http://www.bulog.go.id/>. Diakses tanggal 14 Juli 2013.
- Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG. 2008. *Pedoman Umum Program Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2012*. Jakarta: Depdagri dan Bulog.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan oleh Samodra Wibawa dkk. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Gruber, Jonathan. 2005. *Public Finance and Public Policy*. New York: Worth Publisher. Hastuti dkk. 2008. *Efektivitas Program Raskin*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. *Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin*. Jakarta
- Muhammad, AbdulKadir. 2007. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citra Aditya
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- KEMONKESRAH, 2012. Pedoman umum penyaluran RASKIN, Jakarta

